



Eko Suwanto: Jaga Warga Berperan Strategis Bantu Deteksi Dini Kerawanan Sosial di Wilayah DIY

YOGYA, TRIBUN - Keberadaan Jaga Warga memiliki peran strategis dalam upaya membantu pemda DIY mewujudkan ketertiban, ketenteraman dan keamanan.

Hadirnya personel Jaga Warga di tiap wilayah dengan jiwa kesukarelaan yang dimiliki perlu difasilitasi pemerintah agar bisa bekerjasama dengan pemangku kepentingan guna menyelesaikan masalah di tengah masyarakat.

"Ada kesukarelaan yang dimiliki oleh personel Jaga Warga, menurut nuwun atas kerja bersama yang dijalankan, inilah sifat dasar wong Ngayogyakarta. Kalau mereka bekerja untuk Jaga Warga, RT, RW, Panca Tertib, KTB, Katana, ya begitulah wajah kesukarelaan meski tak digaji, tidak ada honor. Itulah khas watak dengan suka rela yang kita bisa ingat bagaimana bangkitnya warga DIY pasca bencana gempa 2006, erupsi Merapi 2010 ada gotong-royong yang luar biasa. Inilah yang butuh didukung pemerintah, diberikan penghargaan dengan fasilitas guna jalankan tugas lapangan," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan dalam Jagongan Jaga Warga bersama Satpol PP DIY, Senin (10/7). Acara ini didukung penuh oleh Dana Keistimewaan.

Di dalam kesempatan berdialog bersama Satpol PP DIY, Panigadya Keistimewaan dan Jaga Warga di Tegayrejo, secara simbolis diserahkan alat komunikasi berupa handy talkie (HT) sebagai dukungan bagi kerja personel Jaga Warga di lapangan.

Eko Suwanto menegaskan, hingga kini guna dukungan penciptaan rasa aman dan tentram yang menjadi harapan warga DIY, selidiknya ada Satlinmas sebanyak 3.700-an personel lalu sebanyak 169 Polisi RW dan 45 Babinsa serta Bhabin-kamtibmas.

Selain dukungan alat komunikasi HT, identitas rompi untuk Jaga Warga, kiranya penting ke depan mendapat bimtek bagaimana kerja bersama sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing.

"Yakinlah, dengan dukungan dan kerjasama, tidak ada ruang bagi intoleransi, pelaku klithing yang jadi ancaman persoalan untuk DIY", tegas politisi muda PDI Perjuangan ini.

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad menyatakan sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya, personel Jaga Warga memiliki mandat sesuai dengan Perda 2/2017 tentang Ketertiban Umum, Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat. Ada tugas Pemda untuk mewujudkan ketertiban, rasa aman dan ketenteraman sesuai Pasal 7 dan 8.

Satpol PP DIY dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, pemerintah daerah, hingga kelurahan, padukuhan, RT dan RW. Implementasinya dengan Pergub 28/2021 dengan menghadirkan Jaga Warga.

Jaga Warga dibentuk dengan beranggotakan 25 orang di tiap wilayah. Tugasnya bantu

selesaikan konflik dan lakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan.

"Ada Omah Jaga Warga yang di dalamnya tergabung juga unsur polisi RW. Kalau ada kasus pidana seperti kejahatan jalanan model klithing, bisa teratasi. DIY itu ada 3.000 personel TNI, polisi 7.000 dan Satpol PP 1.700 personel. Jumlah warga DIY mencapai 3,8 juta jiwa, belum nanti ditambah pendatang adik-adik mahasiswa luar daerah. Gubernur DIY membentuk Jaga Warga buat bantu wujudkan ketertiban umum, keamanan dan ketenteraman masyarakat," kata Noviar.

Nugraha Wahyu Winarna, Kabid Kebudayaan Paniradya Pati menjelaskan pendanaan alat komunikasi HT untuk Jaga Warga berasal dari alokasi Dana Keistimewaan.

"Sesuai tujuan Keistimewaan, upaya wujudkan ketertiban umum, keamanan dan ketenteraman masyarakat kita alokasikan buat Jaga Warga. Lewat mekanisme BKK, diwujudkan guna realisasi 41 Omah Jaga Warga di DIY, ke depan dievaluasi dan kala terbukti optimal maka bisa

diusulkan ke pusat guna tambahan Dana Keistimewaan," kata Nugraha Wahyu Winarna, Kabid Kebudayaan Paniradya Pati.

Haryanto, LPMK Kricak Tegayrejo merespons dialog bersama Jaga Warga menyatakan guna dukungan operasional, selama ini di luar tugas menjadi Jaga Warga, sebenarnya sudah bekerja dengan baik untuk berkoordinasi.

"Warga Yogyakarta tentu berharap kerja nyata Jaga Warga, FPMK Sido Rukun misalnya, di dalamnya meski kita tahu personelinnya juga bekerja pakai baju jadi Satlinmas, di level RT, RW sejatinya kita jalankan Musrenbang untuk perencanaan pembangunan. Sepakat dengan kerja Pemda DIY yang responsif. Kalau ada masalah bisa rembugan. Orang tua penting sekali, tahu dan ingatkan anak-anak, surup nang omah, bengi nang omah. Sudah ada Peraturan Wali Kota Yogyakarta soal jam belajar masyarakat, pukul 10 malam anak-anak di pantau apakah bermain di luar atau belajar, orang tua harus tahu," kata Haryanto, Ketua LPMK Tegayrejo. (maw/irs/ord)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005